

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada mulanya upaya pembangunan Negara Sedang Berkembang (NSB) diidentikkan dengan upaya meningkatkan pendapatan per kapita, atau populer disebut strategi pertumbuhan ekonomi. Semula banyak yang beranggapan yang membedakan antara negara maju dengan NSB adalah pendapatan rakyatnya. Dengan ditingkatkannya pendapatan per kapita diharapkan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan yang dihadapi oleh NSB dapat terpecahkan, misalkan melalui apa yang dikenal dengan “dampak merembes ke bawah” (*trickle down effect*). Dengan demikian, tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan unsur yang paling diutamakan sedangkan masalah-masalah lain seperti soal kemiskinan, diskriminasi, pengangguran dan ketimpangan distribusi pendapatan seringkali dinomorduakan (Kuncoro, 2010:1).

Paradigma pembangunan yang baru merupakan proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi, dan institusional demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik. Pembangunan mempunyai tiga tujuan yaitu, peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok, peningkatan standar hidup dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial (Todaro dan Smith, 2004:28).

Kegiatan pembangunan tidak bisa terlepas dari penduduk atau masyarakat, sebab penduduk merupakan titik sentral di dalam proses pembangunan. Pembangunan tidak semata-mata dapat diartikan sebagai proses pembangunan fisik semata, tetapi pembangunan di suatu daerah harus dapat bermanfaat bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya. Sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat tersebut.

Menurut Damayanti (2014) Sasaran pembangunan yang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang di ukur dengan pembangunan manusia yang dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia di tiap-tiap negara. Pembangunan Manusia merupakan model yang memiliki tujuan untuk memperluas kesempatan agar masyarakat dapat hidup layak. Untuk menilai pencapaian pembangunan manusia digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sebagai alat ukur, IPM merupakan alat ukur yang cukup memadai dibandingkan Indeks Komposit yang lain.

Sebagai alat atau tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah IPM yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli). Melalui peningkatan ketiga indikator tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup manusia. Hal ini dikarenakan adanya heterogenitas individu, disparitas geografi serta kondisi sosial masyarakat yang beragam sehingga menyebabkan tingkat pendapatan tidak lagi menjadi tolak ukur utama dalam menghitung tingkat keberhasilan pembangunan (Mirza, 2010).

Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar; terlepas dari hal-hal lain, kedua hal itu merupakan hal yang paling

penting. kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga; keduanya adalah hal yang fundamental untuk membentuk kapabilitas manusia di dalam mengentaskan masalah kemiskinan, ketidakmerataan dan lonjakan pengangguran (Todaro dan Smith, 2004:404).

Dewasa ini, Indonesia masih dihadapkan dengan permasalahan pembangunan manusia. Rendahnya angka Indeks Pembangunan Manusia Indonesia juga tak terlepas dari peran pemerintah yang belum maksimal, khususnya dibidang pendidikan dan kesehatan. Adanya kebijakan yang tertuang dalam Pasal 31 Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke - 4 menyatakan bahwa negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari dana APBN dan APBD untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional, nyatanya tidak dapat mendongkrak nilai Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. Selain itu, pemerintah juga menjalankan program jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Upaya pemerintah ini yang bertujuan meningkatkan taraf kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian. Masih rendahnya angka Indeks Pembangunan Manusia menjadi bukti nyata bahwa ketersediaan pangan, air bersih, sanitasi, energi, dan akses terhadap fasilitas kesehatan masih rendah.

United Nation Development Program (UNDP) memperkenalkan perhitungan IPM metode baru dengan beberapa perbedaan mendasar dibanding metode yang lama. Setidaknya, terdapat dua hal mendasar dalam perubahan metode baru ini. Kedua hal mendasar terdapat pada aspek indikator dan cara perhitungan indeks. Pada metode baru, UNDP memperkenalkan indikator baru

pada dimensi pengetahuan yaitu Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling*). Indikator ini digunakan untuk menggantikan indikator Angka Melek Huruf yang memang saat ini sudah tidak relevan karena capaian di banyak negara sudah tinggi. UNDP juga menggunakan indikator PNP per kapita untuk menggantikan indikator PDB per kapita. Namun, karena indikator PNP per kapita tidak tersedia di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data SUSENAS. Adanya perubahan indikator tersebut tak mengganti peranan Angka Harapan Hidup sebagai pengukuran dimensi kesehatan. (Badan Pusat Statistik, 2017).

Pertumbuhan ekonomi adalah hal yang paling sering dihubungkan dengan Pembangunan Manusia. Dalam hal ini, Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan barang dan jasa yang diproduksi dalam penduduk, sehingga semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi maka akan meningkatkan kesejahteraan penduduk, sehingga akan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.

Pertumbuhan ekonomi yang lebih tepat diukur dengan menggunakan pertumbuhan pendapatan per kapita menuntut adanya kenaikan produk domestik bruto atau pendapatan nasional. Produk domestik bruto (PDB) itu sangat ditentukan oleh digunakannya faktor produksi tenaga kerja, kapital, barang sumber daya alam, tingkat teknologi, dan kondisi sosial dalam negara yang bersangkutan. Pada umumnya terdapat hubungan positif antara jumlah dan kualitas faktor-faktor produksi itu dan PDB. Jadi semakin banyak digunakan alat kapital, tenaga kerja, barang sumber daya alam, tingkat teknologi yang canggih dan kondisi sosial yang mendukung pertumbuhan ekonomi, maka akan semakin tinggi

tingkat PDB pendapatan suatu negara. Namun indikator yang digunakan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah adalah dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto berdasarkan harga konstan (Suparmoko, 2013:239).

Sejak bergulirnya era reformasi atau orde baru, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi telah menyatakan dimulainya pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Untuk mendukung pelaksanaannya, beberapa peraturan pemerintah sudah pula dikeluarkan. Sejak mulai saat itu, pemerintahan dan pembangunan daerah di seluruh nusantara telah memasuki era baru yaitu era otonomi daerah dan era desentralisasi fiskal.

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan pemberian otonomi daerah kepada daerah didasarkan atas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Salah satu syarat yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan atas dasar desentralisasi adalah tersedianya sumber-sumber pembiayaan sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang tersebut telah memberi angin segar pada daerah untuk mengelola keuangan sendiri dengan lebih otonom, karena yang lebih mengerti persoalan daerahnya adalah pemerintah daerah itu sendiri.

Menurut Darise (2007:13-14) Penyelenggaraan otonomi daerah, di samping merupakan amanat konstitusi, juga merupakan kebutuhan objektif dalam penyelenggaraan pemerintah saat ini. Pola penyelenggaraan pemerintah yang sentralistik di masa lalu tidak sesuai lagi-karena di samping tidak efisien, biayanya mahal, juga tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang membaik dan lebih maju karena faktor internal maupun eksternal.

Peran pemerintah pusat di era otonomi daerah ini adalah lebih banyak pada hal-hal yang berkaitan dengan penetapan kebijakan nasional dan pengendalian serta pelaksanaan terhadap hal-hal yang bersifat teknis dan tidak strategis, selebihnya sudah harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah harus mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang lebih efisien dan efektif, demokratis, mendorong peran serta masyarakat, mewujudkan pemerataan dan keadilan serta, mampu mengembangkan segenap potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan kata lain otonomi daerah harus mampu memberdayakan segenap potensi yang dimiliki daerah dan masyarakatnya untuk segenap potensi yang dimiliki daerah dan masyarakatnya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah.

Pemberian otonomi luas pada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memerhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, serta

potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam Undang-Undang tersebut disebutkan sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan yang terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus serta Penerimaan dari Lain-lain pendapatan.

Sumber penerimaan dalam desentralisasi yang pertama adalah Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang mempunyai tujuan untuk memberikan kekuasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Sementara itu sumber penerimaan kedua di dalam desentralisasi adalah Dana Perimbangan. Dana Primbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dalam Hal ini penulis tidak menggunakan Dana Bagi Hasil. Menurut Darise (2007:96) Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah Dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan untuk Provinsi dan kabupaten/kota dengan tujuan pemerataan

kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal. Jadi dengan kata lain, jika pemerintah pusat mengalokasikan DAU relatif besar maka daerah tersebut kurang mandiri. Hal ini kemungkinan disebabkan karena PAD daerah tersebut kecil sehingga pemerintah pusat perlu mengalokasikan dana kepada daerah tersebut (Darise,2007:39).

Menurut Undang- Undang No. 33 tahun 2004, Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN. Daerah tertentu adalah daerah yang memnuhi kriteria yang ditetapkan setiap tahun untuk mendapatkan alokasi DAK. Dengan demikian, tidak semua daerah mendapatkan alokasi DAK.

Belanja Daerah atau Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sukirno,2000) yakni suatu tindakan

pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Sementara menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan Permendagri No. 21 Tahun 2011, belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam penyusunan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas.

PSAP No.2 Paragraf 34 menyatakan bahwa belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja) organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi sendiri menurut paragraf selanjutnya merupakan pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Setyowati dan Suparwati (2012) meneliti bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai variabel intervening di Jawa Tengah. Periode yang digunakan yaitu tahun 2005-2009. Pada Penelitian ini menggunakan Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK dan PAD.

Sedangkan Variabel Dependennya adalah Indeks Pembangunan Manusia dan Variabel Belanja Modal sebagai Variabel Interveningnya. Dari hasil penelitian tersebut, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Putra, Putu Gede Mahendra dan Ulupui (2015) tentang Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Pada penelitian ini variabel independennya adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan Dana Alokasi Umum tidak mampu meningkatkan IPM.

Adelfina dan Jember (2016) tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Pada Penelitian ini menggunakan variable independen Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Belanja Daerah sedangkan variable dependennya menggunakan variable Indeks Pembangunan manusia. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan manusia. Sedangkan Kemiskinan secara parsial berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Namun Secara Simultan Ketiga Variabel di Atas berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Sarkoro, Hastu (2016) tentang Pengaruh Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Pada penelitian ini menggunakan variable independen Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia sebagai Variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Daerah dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia sedangkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Penelitian mengenai pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia ini telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, diantaranya yaitu: Setyowati dan Suparwati (2012), Putra dan Ulupui (2015), Adelfina dan Jember (2016) dan Sarkoro (2016). Namun dari beberapa hasil peneliti terdahulu terdapat perbedaan.

Berdasarkan riset gap di atas, peneliti merasa perlu untuk meneliti mengenai Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan yang sebelumnya diteliti oleh Sarkoro Hastu (2016). Adapun faktor yang akan diuji kembali dalam penelitian ini adalah Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menambahkan variabel

independen berupa Pertumbuhan Ekonomi. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah provinsi Se - Indonesia pada periode 2014-2016.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN BELANJA DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi se - Indonesia Periode 2014-2016)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi (PE) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia?
3. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia?
4. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia?
5. Apakah Belanja Daerah (BD) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PE) terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Belanja Daerah (BD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi sebagai referensi untuk menambah pengetahuan para akademisi mengenai Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Daerah, terhadap indeks pembangunan manusia.

2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya, dalam menambah pengetahuan dan memberikan keyakinan mengenai Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, , Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Daerah, terhadap indeks pembangunan manusia.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara terstruktur dalam bab per bab yang masing-masing bab dibagi menjadi sub bab, hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran penelitian yang lebih jelas dan sistematis agar mempermudah bagi pembaca dalam memahami penulisan penelitian ini. Isi dan bahasan ini disajikan dalam bentuk sistematika, sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang: latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang kajian teori-teori yang digunakan dalam penelitian, hasil penelitian yang relevan, kerangka berpikir dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang: waktu dan wilayah penelitian, jenis penelitian, populasi, sampel dan teknik sampling, data dan sumber data, teknik

pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional variabel, dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang: gambaran umum obyek penelitian, pengujian dan hasil analisis data, pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang: kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran-saran.